



Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Andhika Nurul Wahidah^{1*}, Sandy Leo¹, Vinca R. Y.¹, Rani Gustia¹

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia

*Korespondensi: andhika.nurul@ui.ac.id

Diterima: 20 Juni, 2024

Disetujui: 30 Agustus, 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan kompetitif berkat kekayaan alamnya yang melimpah, yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Hal ini tercermin dalam tingginya IPM Kalimantan Timur di Indonesia, meskipun terdapat ketimpangan IPM antar kabupaten/kota yang mengindikasikan bahwa daya saing sumber daya manusia (SDM) belum optimal. Faktor utama yang mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang terkait dengan sektor perminyakan dan pertambangan yang telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sejak era kolonial. Dampak besar dari industri minyak, batu bara, dan perkebunan membuat ketergantungan ekonomi lokal dan global sangat kuat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi dampak pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur terhadap IPM di wilayah tersebut. **Hasil:** Sumber daya fosil menjadi komoditas ekspor strategis dan prioritas utama provinsi. Namun, pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur menjadi isu utama karena potensi yang dimiliki tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat. **Kesimpulan:** Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur memerlukan perhatian khusus untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Keberadaan ibu kota negara diprediksi akan memberikan pengaruh besar pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan ibu kota negara direncanakan dengan konsep forest city, di mana minimal 50% dari luas kota adalah ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan bentang alam, termasuk kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS).

KATA KUNCI: ibukota negara; indeks pembangunan manusia; Kalimantan Timur.

ABSTRACT

Background: The East Kalimantan Province has a competitive advantage due to its abundant natural resources, which can enhance regional competitiveness. This is reflected in the high Human Development Index (HDI) of East Kalimantan in Indonesia, although there are inequalities in HDI between districts/cities, indicating that the competitiveness of human resources (HR) is not optimal. The main factors affecting human resource competitiveness are education, health, and employment, which are linked to the petroleum and mining sectors that have been the main drivers of East Kalimantan's economic growth since the colonial era. The significant impact of the oil, coal, and plantation industries creates a strong local and global economic dependency. **Methods:** This research uses a literature study method to explore the impact of moving the national capital to East Kalimantan Province on the HDI in the region. **Result:** fossil resources have become a strategic export commodity and the top priority for the province. However, natural resource management in East Kalimantan is a major issue as the potential is not proportionate to the welfare of the community. **Conclusion:** the plan to relocate the capital city to East Kalimantan requires special attention to prevent the exploitation of natural resources and environmental

Cara Pengutipan:

Wahidah, A. N., Leo, S., Y, R. V., & Gustia, R., (2024). Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 65-79. <https://doi.org/.....>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



damage. The establishment of the national capital is expected to have a major influence on improving the Human Development Index, especially in East Kalimantan and Kalimantan as a whole. Therefore, the development of the national capital is planned with the concept of a forest city, where at least 50% of the city area is designated as green open space integrated with the landscape, including hilly areas and watersheds.

KEYWORDS: national capital; human development index; East Kalimantan.

1. Pendahuluan

Kalimantan Timur adalah provinsi yang menempati urutan keempat dalam hal luas wilayah di Indonesia. Daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan kehutanan, dengan cadangan batubara, minyak bumi, dan gas bumi yang melimpah. Sektor pertambangan dan migas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi ini, sementara sektor pertanian juga dikembangkan untuk mendukung ekonomi lokal. Provinsi ini mencakup area seluas 127.346,92 km² dan terdiri dari 10 kabupaten serta kota (Apriyani, 2018). Secara topografi, Kalimantan Timur umumnya berbukit dengan ketinggian antara 0 hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Terletak di garis khatulistiwa, provinsi ini memiliki iklim tropis dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan yang relatif tinggi.

Dalam hal kependudukan, Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.721.389 jiwa yang tersebar 54,17% di 7 kabupaten dan 45,83 % di 3 kota (tabel 1) dengan laju pertumbuhan penduduk 1,99% pada tahun 2019 (tabel 2).

Tabel 1. Proyeksi pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur (2014-2020) (BPS Kalimantan Timur, 2019)

Kabupaten/Kota	Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Perempuan+Laki-Laki) (Jiwa)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	256175	262301	268261	274206	279975	285894	291573
Kutai Barat	144892	145838	146307	146998	147598	148020	148278
Kutai Kartanegara	700439	717789	735016	752091	769337	786122	802903
Kutai Timur	306974	320115	333591	347468	361670	376111	390991
Berau	203223	208893	214828	220601	226509	232287	238214
PPU	152119	154235	156001	157711	159386	160912	162518
Mahakam Ulu	25894	25970	26089	26305	26347	26375	26485
Balikpapan	605096	615574	625968	636012	645727	655178	664201
Samarinda	797006	812597	828303	843446	858080	872768	886806
Bontang	159614	163326	166868	170611	174206	177722	181183
Kalimantan Timur	3351432	3426638	3501232	3575449	3648835	3721389	3793152

Tabel 2. Laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (2014-2020) (BPS Kalimantan Timur, 2019)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Perempuan+Laki-Laki) (Persen)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	2.47	2.39	2.27	2.22	2.10	2.11	1.99
Kutai Barat	0.61	0.65	0.32	0.47	0.41	0.29	0.17
Kutai Kartanegara	2.53	2.48	2.40	2.32	2.29	2.18	2.13
Kutai Timur	4.34	4.28	4.21	4.16	4.09	3.99	3.96
Berau	2.96	2.79	2.84	2.69	2.68	2.55	2.55
PPU	1.27	1.39	1.15	1.10	1.06	0.96	1
Mahakam Ulu	0.84	0.29	0.46	0.83	0.16	0.11	0.42
Balikpapan	1.81	1.73	1.69	1.60	1.53	1.46	1.38
Samarinda	2.05	1.96	1.93	1.83	1.74	1.71	1.61
Bontang	2.40	2.33	2.17	2.24	2.11	2.02	1.95

Kalimantan Timur	2.31	2.24	2.18	2.12	2.05	1.99	1.93
------------------	------	------	------	------	------	------	------

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar ada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tingginya kepadatan penduduk di kota pada umumnya karena memiliki posisi sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Distribusi penduduk yang tidak merata dapat mengakibatkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan akses pelayanan dengan menyediakan konektivitas antar wilayah. Penyediaan fasilitas, lapangan pekerjaan dan infrastruktur harus menjadi perhatian agar terwujud keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial sebagai dampak dari ketidakseimbangan roda perekonomian dan pembangunan.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan tersendiri berkat kekayaan alamnya yang melimpah, yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Kesejahteraan dan daya saing seringkali diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. IPM merupakan alat penting untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, yang mempengaruhi peringkat pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks politik, IPM memberikan rekomendasi kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup, pilihan, dan kapasitas masyarakat di suatu wilayah (Freire et al., 2018). IPM adalah standar alternatif untuk pengukuran pembangunan ekonomi tradisional dan mencerminkan perspektif global tentang kondisi kehidupan masyarakat (Martínez-Guido et al., 2019). Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuat keputusan yang lebih baik terkait risiko kesehatan, seperti gaya hidup dan nutrisi, yang berkontribusi pada penurunan penyakit dan penurunan risiko kecacatan di masa depan (Freire et al., 2018). Kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik dalam masyarakat akan meningkatkan produktivitas kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990. Pendekatan ini menekankan pentingnya manusia sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan (Qiu et al., 2018). Konsep ini mencerminkan bahwa manusia adalah tujuan utama dalam proses sosial ekonomi (Yakunina & Bychkov, 2015). Menurut UNDP (2019), IPM adalah indeks gabungan yang mengukur pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan (kehidupan yang panjang dan sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak. Kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah untuk anak-anak yang memasuki usia sekolah, sedangkan standar hidup diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PNB). Parameter-parameter ini dianggap mencerminkan kualitas hidup. UNDP menggunakan logaritma pendapatan untuk menunjukkan pentingnya pendapatan seiring dengan meningkatnya PNB. Skor dari ketiga dimensi tersebut kemudian digabungkan menggunakan rata-rata geometrik untuk membentuk IPM. Perbedaan antara metode IPM UNDP dan IPM yang digunakan oleh BPS terletak pada nilai minimum dan maksimum dimensi standar hidup layak; UNDP menggunakan indikator PNB per kapita (PPP US\$), sementara BPS menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Rp). Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (BPS, 2019).

IPM Kalimantan Timur berada di peringkat tinggi secara nasional, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara kabupaten/kota yang mengindikasikan bahwa daya saing sumber daya manusia (SDM) belum optimal. Faktor utama yang mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dan kesenjangan pendapatan. Ketidakteraturan pendapatan ini menyebabkan perbedaan kesejahteraan di antara masyarakat. Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota umumnya disebabkan oleh

perbedaan dalam sumber daya alam, kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan. Perbedaan dalam tingkat pembangunan ini mempengaruhi keseimbangan aktivitas ekonomi dan menyebabkan ketidakmerataan kesejahteraan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meratakan pembangunan antar daerah agar tujuan pembangunan dapat dicapai bersama baik di tingkat regional maupun nasional (Yuliani, 2014). Pemerataan pembangunan yang perlu ditingkatkan mencakup pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah dengan IPM rendah.

Adanya rencana pemindahan ibukota Negara (IKN) ke provinsi Kalimantan Timur akan menyebabkan pertumbuhan penduduk di wilayah itu dan hal tersebut tentu akan mempengaruhi peningkatan aktifitas perekonomiannya. Pemindahan itu diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa pemerataan ekonomi masyarakat karena penyebaran penduduk tidak lagi terpusat pada satu wilayah saja. Meningkatnya produktivitas dan berkembangnya infrastruktur akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, dimana produktivitas akan berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja sementara pengembangan infrastruktur akan dikaitkan dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, jalan, teknologi informasi dan komunikasi dan lain-lain (Rasoolimanesh et al., 2019). Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan kondisi existing daerah itu dengan segala sumber daya dan tata kelola yang dimiliki agar dapat mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Membangun perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang nantinya ditimbulkan akibat pengembangan wilayah maka akan berkorelasi dengan peningkatan pembangunan manusianya. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemerataan pendapatan akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat produktivitas. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana potensi yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur saat ini dan kemungkinan pengaruhnya terhadap pembangunan manusia jika Ibukota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. Studi ini bertujuan untuk memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Kalimantan timur dengan mengkaji bagaimana pendapatan daerah, pengelolaan sumber daya dan perubahan infrastruktur.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur untuk menyelidiki potensi dampak pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian, diikuti dengan tinjauan komprehensif terhadap basis data akademis dan laporan pemerintah. Literatur yang relevan dianalisis dengan cara membaca, merangkum, mengkategorikan, dan membandingkan temuan-temuan untuk mengungkap pola dan hubungan antara pemindahan ibu kota dan pertumbuhan IPM. Sintesis dan interpretasi dari temuan-temuan tersebut mengarah pada identifikasi implikasi untuk kebijakan pembangunan dan strategi daerah. Selanjutnya, sebuah laporan penelitian disusun, yang mencakup pendahuluan, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Metode ini memfasilitasi pemanfaatan informasi yang ada secara komprehensif, sehingga memberikan pemahaman yang rinci tentang dampak pemindahan ibu kota terhadap pertumbuhan IPM di Kalimantan Timur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendapatan daerah Kalimantan Timur terhadap indeks pembangunan manusia

Pemerintah provinsi dan daerah Kalimantan Timur memprioritaskan sektor perminyakan dan pertambangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Perkembangan

sektor perminyakan dan pertambangan di Kalimantan Timur telah ada sejak zaman kolonial di kawasan yang kini menjadi Kota Balikpapan. Tunas Nusa Edu-Foundation (2018) menjelaskan bahwa Kota Balikpapan berkembang setelah ditemukannya sumur minyak "Mathilda" di teluk Balikpapan pada 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komendur. Tanggal ini kemudian menjadi peringatan lahirnya Kota Balikpapan. Kemunculan sumur bor lainnya di awal tahun 1900 kemudian mendatangkan banyak pekerja dari luar kota Balikpapan yang umumnya dari Jawa, Cina, dan India. Pedagang dari Sulawesi seperti Bandar dan Bone juga mulai berdatangan. Merekalah yang menjadi asal usul sebagian besar penduduk Balikpapan.

Dengan minyak bumi sebagai sumber daya utama, Balikpapan menjadi kota industri minyak dan terus menyebar ke kawasan lain yang kemudian berkembang menjadi kota baru, seperti Sepinggian, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu, dan Tanjung. Balikpapan tidak hanya menjadi pusat pengeboran melainkan pengelolaan dan pengolahan minyak (Susanto, 2011). Industri minyak yang beroperasi dan berkembang di Kalimantan Timur tidak hanya oleh perusahaan asing, tapi juga perusahaan negara. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan batu bara di Kalimantan Timur.

Setelah era minyak, aktivitas di wilayah Kalimantan Timur sebagian besar beralih ke pertambangan minyak bumi dan batu bara (Susanto, 2011). Cadangan sumber daya alam berupa energi fosil di Kalimantan Timur merupakan salah satu yang terbesar dieksploitasi di Indonesia. Hal ini membuat batu bara menjadi pusat kebijakan energi Indonesia sejak akhir 1970-an hingga sekarang sebagai salah satu sumber utama pembangkit listrik nasional. Dari total luas wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 12,7 juta hektar, sekitar 5,2 juta hektar (46%) dialokasikan untuk kegiatan penambangan dengan jumlah izin penambangan mencapai 1400 (Hadi et al., 2018).

Selain sumber daya minyak dan batu bara yang melimpah, Kalimantan Timur juga memiliki hutan yang dimanfaatkan untuk produksi kayu bulat (log), karet, lada, dan kelapa sawit. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, terjadi penebangan hutan besar-besaran di Kutai Kartanegara ketika rezim orde baru mempercepat pembangunan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pemberian konsesi hutan kepada swasta dan perusahaan milik negara. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri penebangan kayu, pekerja dari Jawa dan Bali didatangkan melalui program transmigrasi pada era tersebut. Namun, eksploitasi hutan yang masif menurunkan produktivitas industri kayu, sehingga pada tahun 1995 komoditi utama beralih ke karet dan lada (Yulian et al., 2017). Krisis moneter menyebabkan banyak perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) bangkrut, melemahkan industri hasil hutan. Pada sekitar tahun 2005-2007, melalui program sawit sejuta hektar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka lahan perkebunan sawit di beberapa kabupaten di wilayah tersebut (Amalia et al., 2019).

Besarnya kontribusi industri minyak, batu bara, dan perkebunan telah menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat antara masyarakat lokal dan ekonomi global. Industri sumber daya fosil menjadi komoditas ekspor strategis dan prioritas utama bagi provinsi. Di Kalimantan Timur, sektor batu bara menyumbang sekitar 35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) provinsi pada tahun 2017 (Arinaldo, 2019). Jika digabungkan dengan sektor minyak dan gas, kontribusinya hampir mencapai setengah dari PDB provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur juga relatif tinggi, yaitu sebesar 51%, meskipun hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya menyumbang 15% dari PAD (Katadata, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur sangat bergantung pada industri sumber daya fosil sebagai bahan bakar ekonominya. Secara prinsip, semakin besar kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), semakin kecil ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah pusat, dan sebaliknya (Hibzon, 2007).

Keadaan keuangan daerah diukur dari pendapatan dan pengeluaran daerah per kapita. Pembiayaan ini bergantung pada potensi daerah serta kemampuan mengembangkan dan mengelola sumber daya yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas, penetapan sasaran pengeluaran pemerintah daerah yang tepat dapat dilakukan dengan memahami kondisi ekonomi lokal secara mendalam, sehingga setiap sasaran yang dipilih dapat ditetapkan sesuai dengan peran yang diharapkan dari pemerintah (Hibzon, 2007). Pengeluaran

pemerintah daerah harus dilakukan seefisien mungkin dengan cara meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan penerimaan, karena dengan berkembangnya suatu daerah, jumlah penduduk dan kebutuhan mereka juga meningkat, sehingga aktivitas dan pengeluaran pemerintah pun meningkat, dan sebaliknya. Ke depannya, peningkatan ini akan menjadi tantangan bagi Kalimantan Timur dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dengan dana sendiri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur menempati peringkat ketiga dari 34 provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta (BPS, 2019). Ini menjadi yang tertinggi di seluruh Kalimantan terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dalam bentuk pengeluaran per kapita. Berdasarkan data dari BPS secara keseluruhan IPM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 adalah 75,83 dengan IPM tertinggi terdapat pada wilayah perkotaan yaitu Samarinda, Bontang dan Balikpapan sementara Kabupaten Mahakam Ulu memiliki IPM terendah dengan nilai 66.67 (tabel 3).

Tabel 3. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 (BPS Kalimantan Timur, 2019)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Paser	66.54	67.11	68.18	69.61	69.87	70.30	71	71.16	71.61	
Kutai Barat	65.90	66.92	67.14	68.13	68.91	69.34	69.99	70.18	70.69	
Kutai Kartanegara	67.45	68.47	69.12	70.71	71.20	71.78	72.19	72.75	73.15	
Kutai Timur	66.94	67.73	68.71	69.79	70.39	70.76	71.10	71.91	72.56	
Berau	69.16	70.43	70.77	72.02	72.26	72.72	73.05	73.56	74.01	
PPU	66.37	66.92	67.17	68.07	68.60	69.26	69.96	70.59	71.13	
Mahakam Ulu	-	-	-	63.81	64.32	64.89	65.51	66.09	66.67	
Balikpapan	75.55	76.02	76.56	77.53	77.93	78.18	78.57	79.01	79.81	
Samarinda	75.85	77.05	77.34	77.84	78.39	78.69	78.91	79.46	79.93	
Bontang	76.97	77.25	77.55	78.34	78.58	78.78	78.92	79.47	79.86	
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	75.83	

Dari perspektif ekonomi, Kalimantan Timur masih bergantung pada minyak bumi, gas alam, dan pertambangan batu bara. Penurunan produksi di sektor migas dan batu bara berdampak pada sektor lain, terutama jasa dan perdagangan, yang mempengaruhi perekonomian Kalimantan Timur. Sektor kehutanan belum sepenuhnya mengoptimalkan produktivitas kawasan yang telah dialokasikan untuk hutan produksi. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, terutama kelapa sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).

Secara umum, pola pertumbuhan di Indonesia mengikuti arah dari kota ke desa, mencakup perkembangan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Harahap (2013) menjelaskan dampak urbanisasi di Indonesia yang dimulai sejak era Orde Baru. Pertama, pada periode 1967-1980, diterapkan kebijakan ekonomi makro yang menjadikan kota sebagai pusat aktivitas ekonomi. Kedua, penerapan kebijakan substitusi impor serta investasi asing di sektor manufaktur yang memperkuat pusat pembangunan di metropolitan Jakarta. Ketiga, mekanisasi sektor pertanian yang pesat pada awal 1980-an, mengakibatkan para pemuda dan sarjana enggan terjun ke dunia pertanian atau kembali ke daerah asal mereka. Pola pertumbuhan ini berkaitan dengan nilai IPM per kapita yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan kabupaten.

Sebagai kawasan yang akan menjadi rencana pemindahan IKN, struktur perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi sektor pertambangan dan penggalian sumber daya batu bara. Kedepannya, struktur perekonomian di kedua kabupaten akan bertambah dengan adanya pemindahan IKN karena walaupun

terletak di kabupaten, IKN hanya berjarak 30 menit dari Balikpapan dan 45 menit dari Samarinda. Akses Lokasi IKN yang bisa ditempuh dari dua kota besar Kalimantan Timur, yaitu Samarinda dan Balikpapan, maka akan sangat mempengaruhi ketergantungan terhadap kedua kota tersebut selama pembangunan IKN hingga IKN sudah beroperasi. Karena kedua kota tersebut sejak dulu sudah menjadi poros utama perekonomian Kaltim dan akan semakin besar pengaruhnya untuk menopang IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan.

Samarinda dan Balikpapan yang berada di pesisir pantai dan tepi sungai sangat strategis sebagai aksesibilitas transportasi kargo penyedia kebutuhan provinsi ditambah lagi dengan adanya fasilitas transportasi bandara internasional di kedua kota dan rencana pembangunan tol Balikpapan-Samarinda. Hal ini akan memperkuat perkembangan kedua kota menjadi megaurban baru di Indonesia dengan peningkatan IPM yang signifikan dibandingkan kabupaten lainnya. Bahkan Samarinda dan Balikpapan juga perlu mempertimbangkan daya dukung kotanya sejak sekarang demi menopang pembangunan yang akan lebih pesat dari sebelumnya. Ketimpangan ini menjadi tantangan baru dalam menyusun strategi pemerataan IPM di Indonesia melalui aksesibilitas infrastruktur.

3.2 Perubahan infrastruktur terhadap pembangunan daerah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kuasa atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebuah daerah yang tidak memiliki sumber daya, baik manusia maupun alam, serta kurangnya insentif seperti infrastruktur, perangkat keras dan lunak, serta keamanan, dapat menyebabkan ketertinggalan dalam pembangunan (Azis, 1994). Pemerintah telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan dana untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun hasil pembangunan tersebut dapat dilihat di berbagai daerah, masih terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antara daerah satu dengan yang lainnya (Widayati, 2017).

Pada tahun 2018, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan penerimaan dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) terbesar di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Keuangan, dana bagi hasil SDA untuk calon ibu kota negara baru tersebut mencapai Rp 10,21 triliun pada tahun 2018. Jumlah ini jauh melebihi dana yang diterima oleh Jawa Timur (Rp 6,07 triliun), Sumatera Selatan (Rp 4,7 triliun), dan Papua (Rp 3,2 triliun) (Kusnandar, 2019). Namun, meskipun Kalimantan Timur menerima dana SDA dalam jumlah besar, hal ini belum menghasilkan kesejahteraan yang signifikan, karena berbagai indikator ekonomi dan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, menunjukkan bahwa Kalimantan Timur masih jauh dari rata-rata nasional. Masalah ini termasuk infrastruktur jalan, akses antar kabupaten dan kota, serta akses antar kecamatan dan desa yang masih sangat buruk atau bahkan belum ada (Saragih, 2018).

Menurut Mubyarto (2005), kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Timur belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar daerah. Hal ini tercermin dalam indeks eksploitasi ekonomi yang tetap tinggi antara tahun 1996 hingga 2002, yang menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi oleh pemerintah pusat atau investor asing hanya meningkat dari 89% menjadi 90% selama periode tersebut. Indeks ini mengukur tingkat "eksploitasi ekonomi" dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan pengeluaran konsumsi per kapita. Kalimantan Timur termasuk dalam 12 provinsi dengan indeks eksploitasi ekonomi yang tinggi, seiring dengan provinsi-provinsi kaya SDA lainnya seperti Riau, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan (Kuncoro & Idris, 2015).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat didorong melalui pembangunan infrastruktur yang efektif. Infrastruktur memiliki peranan kunci dalam menarik investasi, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga berkontribusi pada tercapainya keadilan sosial di kalangan masyarakat (Sina & Farida,

2018). Penelitian oleh Warsilan & Noor (2015) mengungkapkan bahwa infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Kualitas dan kelengkapan infrastruktur kesehatan di Kota Samarinda berhubungan langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur air bersih menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; semakin baik akses air bersih bagi masyarakat, semakin besar pula dampaknya terhadap ekonomi kota. Selain itu, infrastruktur jalan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda, di mana akses yang lebih baik melalui jalan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam penetapan kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur jalan di Kota Samarinda, langkah pertama adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penambahan panjang jalan, langkah kedua adalah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan penambahan fasilitas jalan, dan langkah ketiga adalah mengurangi kemiskinan melalui penambahan panjang jalan (Warsilan & Noor, 2015).

Kebijakan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur di Kalimantan Timur memberikan manfaat positif baik bagi masyarakat maupun daerah, yang tercermin dari peningkatan PDRB yang dikaji dari sektor pembangunan, industri, dan sektor lainnya. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2015, rata-rata pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha mencapai 2,95%. Hampir seluruh sektor ekonomi di Kalimantan Timur mengalami percepatan pertumbuhan, dengan Kutai Kartanegara memiliki rata-rata PDRB sebesar Rp 127,4 triliun, diikuti oleh Kutai Timur dengan Rp 62,4 triliun dan kota Bontang dengan Rp 61,51 triliun. Selama periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di kabupaten Paser dengan rata-rata 8,18%, diikuti oleh kabupaten Berau dengan 7,39%, dan Kutai Timur dengan 6,95% (Sina & Farida, 2018).

Pengembangan transportasi jalan merupakan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Tapi pengembangan transportasi jalan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari indeks aksesibilitas yang menunjukkan hanya 4 dari 13 kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas dengan kategori baik. Indeks aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan akses dalam melakukan perpindahan dari asal ke tujuan (origin-destination), serta menunjukkan adanya unsur daya tarik yang terdapat di suatu wilayah dan kemudahan mencapai wilayah tersebut.

Tabel 4. Indeks aksesibilitas wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Sitorus et al., 2017)

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Aksesibilitas	Kategori
1	Paser	0,237883	Cukup
2	Kutai Barat	0,019818	Kurang
3	Kutai Kartanegara	1,299308	Baik
4	Kutai Timur	0,770975	Cukup
5	Berau	0,062629	Cukup
6	Malinau	0,012675	Kurang
7	Bulungan	0,020887	Cukup
8	Nunukan	0,014543	Kurang
9	Penajam Paser Utara	1,344444	Baik
10	Balikpapan	1,84225	Baik
11	Tarakan	0,053351	Cukup
12	Bontang	0,367347	Cukup
13	Samarinda	2,9369	Baik

Saat ini, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur tergolong rendah, yakni hanya 52,53 km per 1000 km², dan keterbatasan jaringan jalan ini berdampak pada laju perkembangan wilayah serta potensi daerah yang dapat dioptimalkan. Akibatnya, layanan transportasi jalan belum sepenuhnya mencakup seluruh wilayah, terutama di bagian utara, barat, perbatasan, dan daerah pedalaman, yang menghambat distribusi barang dan komoditas unggulan antar kabupaten dan kota. Jaringan transportasi yang ada juga perlu dikembangkan untuk menciptakan integrasi yang lebih baik dengan moda

transportasi lainnya. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi akan mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur (Sitorus et al., 2017).

Penelitian oleh Zaini (2017) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil dalam melaksanakan fungsi distribusi yang efektif. Meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal. Ketimpangan pembangunan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung memperburuk ketidakmerataan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian mungkin menjadi alasan mengapa PDRB per kapita tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sektor-sektor lain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Sektor pertanian, meskipun saat ini tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap pemerataan pendapatan, memiliki potensi untuk memperbaiki distribusi pendapatan jika dikelola dengan lebih produktif dan berorientasi pasar. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur bekerja di sektor pertanian, menjadikannya sektor yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah daerah harus mendorong sektor pertanian untuk menjadi lebih produktif dan terintegrasi dengan pasar serta industri, serta terus mengembangkan program perkebunan kelapa sawit dengan infrastruktur yang mendukung agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian (Sina & Farida, 2018).

Perdebatan tentang wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur menjadi topik utama karena meskipun provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, hal tersebut belum diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat yang sepadan. Kenyataan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang ada justru menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Pemerintah provinsi, yang seharusnya mengoordinasikan pengelolaan sumber daya alam antar wilayah, belum menunjukkan perannya secara efektif. Untuk itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap potensi khas daerah seperti hutan, tambang, dan perkebunan, agar wewenang pengelolaan dapat dilaksanakan dengan baik dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, pemerintah provinsi harus memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal pemberian izin dan penentuan wilayah pengelolaan yang melintasi batas administratif kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota berperan sebagai pelaksana teknis. Kajian mendalam mengenai fungsi koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur juga diperlukan (Barlian, 2012).

Rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur memerlukan perhatian yang cermat untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Dalam "Dialog Nasional Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara", Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., mengemukakan tiga konsep utama dalam pengembangan ibu kota dari sudut pandang lingkungan dan kehutanan. Konsep tersebut meliputi kemudahan dalam proses pembangunan ibu kota, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan. Infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan aspek ramah lingkungan, seperti efisiensi emisi, penggunaan air, dan energi. Selain itu, penting untuk menjaga kawasan hutan tertentu di sekitar ibu kota yang berfungsi sebagai Sistem Penyangga Kehidupan. Prinsip keberlanjutan dan keseimbangan harus diterapkan sepanjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (Nurbaya, 2019; Safutra, 2019).

3.3 Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur telah direncanakan beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan

rencana pemindahan ibukota negara pada Pidato Kenegaraan di DPR tanggal 16 Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman lokasi pembangunan ibukota pada tanggal 26 Agustus 2019 (Ihsanuddin, 2019). Sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dipilih menjadi lokasi baru pembangunan ibukota negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas (2019) memaparkan bahwa ada beberapa faktor mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibukota negara, diantaranya bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami, berada dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, aksesibilitas bandara dan pelabuhan yang memadai, infrastruktur jalan yang memadai (Jalan Trans Kalimantan dan Tol Balikpapan-Samarinda), ketersediaan lahan pemerintah yang luas, ketersediaan sumber air, kemampuan tanah menahan konstruksi bangunan dan bebas banjir, didukung oleh sektor pertahanan, dan struktur penduduk yang heterogen dan terbuka terhadap pendatang.

Pembangunan ibukota negara direncanakan akan mengusung konsep forest city, di mana ruang terbuka hijau minimal seluas 50% dari luas kota dan terintegrasi dengan bentang alam yang ada meliputi kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, ibukota negara juga akan memanfaatkan energi terbarukan dan rendah karbon, serta menerapkan efisiensi dan konservasi energi dengan green buiding design. Pengembangan smart city management, keberadaan universitas riset dan industri, serta penunangan sistem transportasi publik juga akan dipersiapkan di ibukota baru ini (Bappenas, 2019).

Sebagian besar kawasan target pembangunan ibukota negara masih berupa ekosistem alami hutan tropis. Dalam perencanaan pembangunannya, sebagai bentuk rekayasa pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan ibukota negara perlu mempertimbangkan kelestarian hutan, termasuk konsep ibukota negara berupa forest city sebagai bentuk kesetimbangan ekosistem buatan dan ruang hijaunya. Ruang hijau perkotaan menjadi komponen penting ekosistem perkotaan karena menyediakan banyak layanan lingkungan dan sosial yang berkontribusi pada kualitas hidup di kota. Konsep penataan forest city saat ini telah diaplikasikan di Balikpapan. Selain wilayah perkotaan, Balikpapan masih melestarikan daerah penyangga atau hutan lindung kota, yang dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara (Susanto, 2011).

Keberadaan hutan di kawasan ibukota negara akan memberikan berbagai manfaat, terutama manfaat secara lingkungan, diantaranya menjadi kawasan resapan air, kontrol iklim, memperbaiki kualitas udara perkotaan, meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan memiliki nilai properti. Adanya hutan di kawasan perkotaan juga mampu mengurangi banjir, mencegah erosi sebagai akibat curah hujan tinggi dan meningkatkan penyerapan air tanah. Pada kota-kota besar di Amerika Serikat, keberadaan hutan kota mampu memberikan keuntungan \$100 hingga \$400 milyar karena tersedianya air serapan hutan kota untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dan mampu mengurangi biaya pelayanan publik serta menambah pendapatan daerah secara signifikan. Terlebih lagi, secara iklim keberadaan hutan kota sangat baik untuk mengurangi efek panas urban (urban heat effect) dan berperan sebagai penyerap karbon yang jika divalusi memiliki nilai yang sangat besar (Young, 2011).

Pemindahan ibukota negara di Indonesia, bukan menjadi yang pertama kalinya di dunia. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Argentina, Brasil, hingga Malaysia juga pernah memindahkan ibukota negaranya dari satu kota ke kota lain. Saat ini, terdapat sekitar 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki rencana untuk memindahkan ibukota negaranya (Richard, 2019). Secara umum, pemindahan ibukota negara di seluruh dunia didasari oleh kepentingan politik dan ekonomi atau kebijakan yang mendukung untuk pemindahan tersebut. Lebih lanjut, pemindahan ibukota negara ini mewakili keinginan untuk membedakan dari ibukota pada zaman kolonial atau menempatkan ibukota pada jantung geografis negara untuk meningkatkan aksesibilitas ke seluruh daerah. Ibukota baru akan berperan sebagai identitas nasional baru atau sebagai strategi untuk meminimalisir dan mencegah gerakan separatis (Moser, 2019).

Keberadaan ibukota negara tentu akan memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan indeks pembangunan manusia, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. Apabila merujuk ke konsep pembangunan kota ideal seperti yang telah disusun oleh Bappenas, pemindahan dan pembangunan ibukota negara harus memperhatikan aspek urbanisasi, di mana orang akan berbondong-bondong datang dan menetap di ibukota negara. Para perencana tata ruang tentu akan membangun kota yang bebas dari pemukiman kumuh dan pembangunan tempat tinggal dibagi berdasarkan klasifikasi sosial dan ekonominya. Apabila aspek urbanisasi tidak diperhatikan dengan hati-hati, maka akan kembali memunculkan masalah dan konflik sosial seperti yang telah terjadi di Jakarta saat ini (Gilbert, 1989).

Dalam membangun kota berkelanjutan (*sustainable city*), terdapat lima aspek yang harus diperhatikan, mulai dari penghidupan (*livelihood*), keberlanjutan lingkungan, bentuk spasial dan infrastruktur, sumber pendapatan dan pemerintahan yang mengatur kehidupan kota (Rasoolimanesh et al., 2012). Salah satu aspek pembangunan ibukota negara yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang memadai tentu akan menggerakkan berbagai sektor yang krusial dalam pembangunan. Beberapa sektor, terutama pendidikan, ekonomi dan kesehatan sangat berpengaruh dalam pembangunan manusia, termasuk bagi yang nantinya akan tinggal di sekitar ibukota negara. Apabila pembangunan sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat dimaksimalkan, maka dapat dipastikan indeks pembangunan manusia di ibukota negara, Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan dapat meningkat secara signifikan.

Pertumbuhan indeks pembangunan manusia yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional. Terdapat korelasi positif antara indeks pembangunan manusia dengan produk nasional bruto / *gross national product* (GNP) dan produk domestik bruto / *gross domestic product* (GDP) suatu negara. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia, maka negara tersebut akan memiliki pendapatan yang besar secara ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai negara maju (Trabold-Nübler, 1991; Lind, 1992). Keberadaan ibukota negara di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia, terutama pada daerah yang terpencil dan tertinggal. Pembangunan sarana prasarana dapat diprioritaskan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal dengan kawasan urban, sehingga pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara merata.

Terakhir, pembangunan ibukota negara dengan konsep *sustainable city* tentu harus memperhatikan tiga aspek penting dalam keberlanjutan, yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus berjalan seimbang. Kota berkelanjutan harus memiliki kondisi yang sesuai, seperti penggunaan sumber daya yang tepat, proteksi lingkungan alami, penggunaan sumber tidak terbarukan yang tepat, pertumbuhan ekonomi, kepercayaan diri masyarakat, kesejahteraan individu dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Rasoolimanesh et al., 2012). Dengan demikian, rencana pembangunan dan pengembangan ibukota negara dengan konsep *sustainable city* sangat diharapkan dapat dicontoh dan diaplikasi oleh kota-kota lain di Indonesia agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di seluruh Indonesia.

4. Kesimpulan

Pemindahan ibukota negara (IKN) baru ke Provinsi Kalimantan Timur akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan keseluruhan secara signifikan. Banyak fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibangun untuk mendukung peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang menjadi tolak ukur dari nilai indeks pembangunan manusia. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan semakin tinggi dikarenakan adanya pusat-pusat perekonomian dan bisnis baru yang akan dibangun untuk menunjang mobilitas dan perekonomian ibukota negara. Pengelolaan alam pun juga akan sangat diperhatikan karena

pembangunan ibukota negara mengusung konsep (forest city). Selain itu, ibukota negara juga akan menjadi parameter dan tolak ukur baru bagi perkembangan dan kemajuan kota-kota lainnya di Indonesia.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Amalia, R, Dharmawan, A.H., Prasetyo L.B., Pacheco P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130-139. <https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139>
- Apriyani, M. (2018). *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2018*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Arinaldo, D., Adiatma, J. C. (2019). *Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- Azis, I. J. (1994). *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Paparan Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara*.

- Barlian, J. (2012). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Propinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan), 8(1), 7–30.
- BPS Kalimantan Timur. (2019). Retrieved October 15, 2019, from <https://kaltim.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- BPS. (2019). Retrieved October 15, 2019, from https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Booklet-IPM-Metode-Baru.pdf
- Freire, R. C., Pieruccini-Faria, F., & Montero-Odasso, M. (2018). Are Human Development Index dimensions associated with gait performance in older adults? A systematic review. *Experimental Gerontology*, 102, 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.12.001>
- Gilbert, A. (1989). Moving the capital of Argentina: a further example of utopian planning?. *Cities*, 6(3), 234–242.
- Hadi, S. P., Prabawani, B., & Purnaweni, H. (2018). Environmental and social issues on energy policy in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 73, 4–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302002>
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Journal of Economic & Development*, 5(33), 106–116.
- Ihsanuddin. (2019). Jokowi umumkan lokasi baru ibu kota baru Senin siang ini. *Kompas.com*: 1 hlm. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/08130121/jokowi-umumkan-lokasi-ibu-kota-baru-senin-siang-ini?page=all>, 16 Oktober 2019, pk. 14.40 WIB.
- Katadata. (2019). Inilah pendapatan asli daerah dua kabupaten calon ibu kota baru Indonesia. Retrieved October 9, 2019, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/inilah-pendapatan-asli-daerah-dua-kabupaten-calon-ibu-kota-baru-indonesia>
- Kuncoro, M., & Idris, A. N. (2015). Mengapa Terjadi Growth Without Development Di Provinsi Kalimantan Timur? *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 172. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.323>
- Kusnandar, V. B. (2019). Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Terbesar di Indonesia | Databoks. Retrieved October 10, 2019, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/30/dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam-kalimantan-timur-terbesar-di-indonesia>
- Lind, N. C. (1992). Some thoughts on the human development index. *Social Indicators Research*, 27(1), 89–101.
- Martínez-Guido, S. I., González-Campos, J. B., & Ponce-Ortega, J. M. (2019). Strategic planning to improve the Human Development Index in disenfranchised communities through satisfying food, water and energy needs. *Food and Bioproducts Processing*, 117, 14–29. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2019.06.007>
- Moser, S. (2019). Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation, by Vadim Rossman. *Journal of Urban Affairs*, 41(4), 0–0. <https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1522906>
- Mubyarto. 2005. Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional. PUSTEP-UGM & Aditya Media, Yogyakarta.
- Nurbaya, S. (2019). Perspektif Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Dialog Nasional Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara*. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/PERSPEKTIF_LINGKUNGAN_HIDUP_DLM_RENCANA_PEMINDAHAN_IKN_edit4_share.pdf
- Qiu, Q., Sung, J., Davis, W., & Tchernis, R. (2018). Using spatial factor analysis to measure human development. *Journal of Development Economics*, 132, 130–149. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.12.007>
- Rasoolimanesh, S. M., Badarulzaman, N. & Jaafar, M. (2012). City Development Strategies (CDS) and Sustainable Urbanization in Developing World. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36, 623–631.

- Rasoolimanesh, S. M., Badarulzaman, N., Abdullah, A., & Behrang, M. (2019). How governance influences the components of sustainable urban development? *Journal of Cleaner Production*, 238. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117983>
- Richard, K.S. (2019). Capital city relocation: countries that have moved their governments. ThoughtCo.: 1 hlm. Retrieved Oktober 16, 2019, from <https://www.thoughtco.com/capital-city-relocation-1435389>
- Safutra, I. (2019). Pembangunan Ibu Kota Baru Jangan Sampai Merusak Hutan di Kaltim. Retrieved October 10, 2019, from <https://www.jawapos.com/infrastruktur/04/09/2019/pembangunan-ibu-kota-baru-jangan-sampai-merusak-hutan-di-kaltim/>
- Saragih, B. (2018). Tugas Berat Gubernur Kaltim 2018, Menghindarkan Rakyat Dari Kutukan Sumberdaya Alam. Retrieved October 10, 2019, from <https://kaltim.tribunnews.com/2018/06/22/tugas-berat-gubernur-kaltim-2018-menghindarkan-rakyat-dari-kutukan-sumberdaya-alam?page=all>
- Sina, A. I., & Farida, L. E. (2018). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 3, 34–42.
- Sitorus, B., Sitorus, T. I. H., & Subandi, S. (2017). Peningkatan Jaringan Transportasi Di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Aksesibilitas Wilayah. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i1.136>
- Susanto, N. N. (2011). Kehadiran Belanda dan Tata Kota Balikpapan. *Naditira Widya*, 5(1), 46-59.
- Trabold-Nübler, H. (1991). The human development index—A new development indicator? *Intereconomics*, 26(5), 236–243.
- Tunas Nusa Edu-Foundation. (2018). Rentang Sejarah Balikpapan. Indonesia Cities Research, Tunas Nusa Edu-Foundation. Retrieved October 9, 2019, from <http://tunasnusa.org>
- UNDP. (2019). Human Development Index. United Nation of Development Program. Retrieved October 10, 2019, from <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 359. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1444>
- Widayati, E. (2017). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008. *Media Ekonomi*, 18(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.8>
- Yakunina, R. P., & Bychkov, G. A. (2015). Correlation Analysis of the Components of the Human Development Index Across Countries. *Procedia Economics and Finance*, 24, 766–771. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00692-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00692-9)
- Young, R. F. (2011). Planting the living city: Best practices in planning green infrastructure - Results from major U.S. cities. *Journal of the American Planning Association*, 77(4), 368–381.
- Yulian B.E., Dharmawan A.H., Soetarto E., Pacheco P. (2017). Dilema nafkah rumahtangga pedesaan sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 242-249.
- Yuliani, T. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8(1): 1-88. <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1>
- Zaini, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(2), 111–130. <https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.309>

Biografi Penulis

Andhika Nurul Wahidah, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

- Email: andhika.nurul@ui.ac.id
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2468-8044>
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

Sandy Leo, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

- Email:
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4394-0038>
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

Vinca R. Y., Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

Rani Gustia, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: